

## Bertahan di Tengah Krisis: Kestinambungan Pabrik Gula Kebon Agung di Malang 1930an - 1958

Dwi Meya Ramadhani<sup>1</sup>, La Ode Rabani<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Alumni Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga

<sup>2</sup>Staf Pengajar di Departemen Ilmu Sejarah, FIB Universitas Airlangga

\*Koresponden: laode.rabani@fib.unair.ac.id

### ABSTRACT

*This study discusses the continuity of the Kebon Agung Sugar Factory from the crisis period in 1930 until it was nationalized in 1960. The economic crisis that hit Europe and the world had an impact on the collapse of most of the sugar industries in the Dutch East Indies. Kebon Agung Sugar Factory managed to survive in the midst of a global crisis that began towards the end of 1929. Throughout that period, various crises hit the world and Indonesia such as economic, social, and political crises. This research uses historical methods with the following stages; topic selection, heuristics, interpretation, data analysis, and historiography. The results showed that the Kebon Agung sugar factory was part of the history of the sugar industry in the colonial period which contributed to the increase in sugar production in the Dutch East Indies. This sugar factory was able to survive the crisis that accompanied its history because of its efficiency strategy, production reduction, and cooperation with other sugar factories in terms of utilizing pre-existing infrastructure such as no longer building railways and roads for the transportation of raw materials (sugarcane) to the factory. In the midst of the crisis and the threat of bankruptcy, the Kebon Agung Sugar Factory still survived and continued to carry out production activities until the sugar factory was nationalized in 1958. Thus, the Kebon Agung Sugar Factory also recorded its history by contributing to efforts improve the state economy.*

**Keyword:** : *Survive strategy in crisis, efficiency, continuity, sugar factory of Kebon Agung, and contribution for economic state*

---

### PENDAHULUAN

Sejarah mengolah tebu menjadi gula mulai dikenal oleh masyarakat Jawa sejak lama. Keahlian mengolah tebu menjadi gula tersebut diperoleh dari para imigran China yang datang ke Jawa pada abad ke-15 (Mubyarto, 1991, p. 5). Tebu dan gula menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, terutama pada abad ke-19 di mana permintaan gula semakin tinggi di pasar dunia. Jawa sebagai pusat penanaman tebu dan pusat industri kolonial melakukan produksi gula dengan cara memperluas lahan perkebunan tebu dan membangun pabrik gula di sekitar perkebunan. Kondisi itu mendorong peningkatan produksi gula sejak tahun 1900an-1930an. Produksi gula kolonial yang berasal dari Jawa terus meningkat hingga menjadi penghasil gula terbesar dunia. Keuntungan kolonial dari hasil industri gula yang terus meningkat

mendorong minat swasta Eropa untuk berinvestasi dalam proyek-proyek industri kolonial, terutama pembangunan pabrik gula dan perluasan lahan untuk penanaman tebu di Jawa. Akibatnya, Jawa menjadi salah satu pusat pabrik gula modern saat itu dan menjadi pusat perkebunan tebu yang luas (Galloway, 2005; Knight, 2013, 2014).

Keterlibatan intensif investor untuk penanaman tanaman penghasil gula (tebu) salah satunya didorong oleh adanya Undang-undang Agraria (*Agrarische Wet*) dan Undang-undang Gula tahun 1870 (Alkema, 1932). Isi pokok dari Undang-Undang tersebut yaitu para penanam modal diberikan kebebasan untuk menanam modal di Hindia Belanda dan menyewa tanah dalam jangka waktu 75 tahun. Dengan undang-undang itu, perubahan drastis atas tanah di Jawa menjadi pusat-pusat perkebunan. Selain itu, perkebunan swasta ada di hampir seluruh Jawa (Basundoro, 2009, p. 239)(Basundoro, 2011). Perkembangan perkebunan yang pesat tersebut merubah wilayah secara masif, yang sebelumnya masih banyak hutan dan lahan yang belum digarap menjadi wilayah perkebunan. Kondisi itu dialami juga oleh wilayah Malang di mana sebelum pemberlakuan UUA 1870 dan masuknya investor untuk perluasan perkebunan masih sebagai wilayah yang dipenuhi hutan dan lahan yang tidak dimanfaatkan.(Hudiyanto, 2015, pp. 96–115) .

Dengan kondisi itu, maka kehadiran investor Belanda di Malang telah menggeser kebiasaan sistem perkebunan dan penanaman lokal yang hanya berorientasi untuk memenuhi kebutuhan lokal Malang atau masyarakat sekitar ke pemenuhan untuk masyarakat global. Perkebunan dibuka seperti the dan tebu digalakkan dengan sistem modern yang ditandai dengan kontrol penanaman, bibit, dan jumlah pasokan air yang masuk ke areal perkebunan. Selain itu juga dilakukan pemupukan dalam jangka waktu tertentu, penggunaan tenaga kerja yang pasti, dan pengawasan pertumbuhan tanaman secara berkala dan teratur. Hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Sebelum Belanda datang, masyarakat Malang sudah mengenal sistem perkebunan lokal. Perlakuan tanaman yang berorientasi sistem perkebunan modern yang melekat pada sistem perkebunan kolonial dengan fokus pada keuntungan besar dan juga pasar yang luas itu menjadi titik balik dimulainya perubahan yang terjadi pada perekonomian di *Afdeeling* Malang (Hudiyanto, 2015, p. 4).

Penguatan pada ekonomi perkebunan di Malang diperkuat dengan lahirnya kebijakan Gubernur Jenderal Burggraaf Du Bus Gisignies yang menetapkan tanah-tanah terlantar di *Afdeeling* Malang untuk diambil alih dan dimanfaatkan sebagai tanah perkebunan yang menghasilkan komoditas komersial dan menguntungkan secara ekonomi. Di tengah upaya pemerintah kolonial untuk meningkatkan ekonomi di *Afdeeling* Malang yang masif, tetap saja terdapat kesulitan seperti infrastruktur jalan dan moda transportasi yang belum maksimal untuk mengalirkan distribusi hasil

perkebunan dan komoditas dari pusat-pusat produksinya ke jaringan transportasi utama. Oleh karena itu pemerintah kolonial membangun dan memodernisasi jaringan jalan dan transportasi dari dan ke pusat-pusat perkebunan di Malang (Basundoro, 2009; Gemeenteraad van Malang, 1927; Handinoto, 1996).

Pusat-pusat perkebunan khususnya tebu sebagai bahan baku gula di Afdeling Malang adalah Bululawang, Gondanglegi, Wajak, dan Sumber Pucung (Eropa), sedang perkebunan tebu rakyat menyebar di wilayah Pakis, Dampit, Tumpang, Poncokusumo, Sumberpucung, Sumbermanjing, dan Pakisaji. Semua hasil perkebunan itu dibawa dan dijual ke pabrik untuk diproses menjadi gula, termasuk Pabrik Gula Kebon Agung yang menjadi fokus artikel ini. Pabrik Gula Kebon Agung adalah pabrik gula ke-4 dari 5 pabrik gula yang didirikan di Malang tahun 1905. Pada tahun 1906 Pabrik Gula Kreet di Malang, setahun setelah pabrik gula Kebon Agung. Fakta itu menunjukkan bahwa Malang menjadi salah satu pusat perkebunan dan Industri yang didukung oleh tanah dan alamnya yang subur dan melimpahnya air untuk mendukung perkebunan khususnya tebu. Sepanjang periode 1930an sampai 1950an, Indonesia termasuk di Malang berada dalam situasi krisis ekonomi dan politik. Kondisi itu ikut mempengaruhi ekonomi dan industri seperti penurunan produksi, penjualan, dan distribusi. Banyak pabrik gula yang melakukan adaptasi dan tidak sedikit dari pabrik gula itu mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, penting melihat bagaimana sebagian dari pabrik gula itu bertahan dan ikut berkontribusi pada perekonomian negara (Indonesia) dalam periode krisis.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini dalam penelitian dan penulisannya menggunakan metode sejarah Tahapan metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo adalah heuristik atau pengumpulan sumber yang relevan dengan topik, melakukan klasifikasi sumber dan meverifikasinya (kritik sumber) agar sesuai dengan lingkup penelitian (validitas). Selanjutnya, sumber-sumber atau bahan-bahan yang telah diverifikasi dilakukan interpretasi dan menganalisisnya untuk dijadikan sebagai fakta sebagai bahan utama dalam penulisan artikel ini (historiografi) dalam bentuk cerita sejarah yang bersifat kronologis atau historiografi (Kuntowijoyo, 1995, p. 104). Dengan metode itu, artikel ini disusun membentuk sebuah rangkaian tulisan sejarah keberlanjutan Pabrik Gula Kebon Agung yang bertahan di tengah krisis dan masih berkontribusi pada ekonomi negara hingga pabrik gula itu dinasionalisasi pada tahun 1958.

## **PEMBAHASAN**

### **Alam dan Masyarakat Malang pada Masa Kolonial**

Malang merupakan wilayah pedalaman yang berada di ketinggian 450 meter di atas permukaan laut dan terletak di antara dua barisan pegunungan yaitu Pegunungan

Bromo-Semeru dan Pegunungan Kawi-Arjuna. Letaknya yang cukup strategis karena diapit oleh pegunungan tersebut membuat Malang menjadi wilayah yang menjanjikan terutama di bidang pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan membutuhkan tanah yang subur, dan tidak semua jenis tanah dapat ditanami tumbuhan. Tanah di wilayah Malang terdiri dari tanah aluvial kelabu kehitaman, mediteran coklat, asosiasi andosol coklat abu-abu (grey) humus dan asosiasi latosol coklat kemerahan grey cokelat (Veth, 1882, p. 960). Tanah aluvial merupakan tanah endapan yang berasal dari lumpur aliran sungai, tanah ini bisa dijumpai di sekitar hilir. Tanah jenis alluvial cocok digunakan untuk penanaman padi dan palawija. Tanah jenis andosol yaitu jenis tanah yang mengandung unsur hara dan mineral. Tanah ini biasanya tersebar di sekitar lereng pegunungan dekat dengan gunung berapi aktif. Tanah andosol terbentuk karena adanya proses vulkanisme dari abu vulkanik gunung berapi. Malang menerima abu vulkanik dari beberapa letusan gunung api aktif seperti gunung kelud, semeru, dan sekitarnya (Kemmerling & Dienst van het mijnwezen in Nederlandsch Oost-Indië, 1921). Selanjutnya yaitu tanah mediteran yaitu tanah hasil pelapukan dari batuan kapur dan batuan sedimen. Tanah mediteran kurang cocok untuk digunakan sebagai tanah atau lahan pertanian karena mengandung pH tinggi. Sedangkan tanah jenis latosol adalah jenis tanah bertekstur seperti lempung dan banyak ditemukan pada daerah dengan curah hujan tinggi seperti di Malang.

Selaras dengan banyaknya variasi tanah di Malang, wilayah ini dialiri oleh sungai-sungai besar, seperti Sungai Brantas, Sungai Metro, dan Sungai Amprong. Sungai tersebut membantu tersedianya air untuk kebutuhan perkebunan jangka panjang, bahkan hulu dari Brantas yang mengalir ke Surabaya dan sekitarnya berasal dari Malang. Dukungan alam dan geografis wilayah Malang dengan curah hujan tinggi yaitu mencapai 1.799 mm/tahun lebih dari cukup untuk menjaga kelembaban dan kesuburan tanah serta ketersediaan air untuk pertanian dan perkebunan (Suwardono, 1996, p. 1). Hal itu diperkuat oleh kondisi kekinian di Malang dengan suhu yang dingin di antara 16-26 derajat celsius (BPS Malang, 2020).

Jejak masyarakat Malang sejak lama dapat ditemukan di wilayah itu. Jejak itu antara lain penemuan situs Watu Gong yang berada tidak jauh dari sisi aliran sungai Brantas. Selain itu, ditemukan juga candi di Singasari sebagai bukti hasil peradaban masyarakat Malang. Pusat pemukiman di Singasari merupakan pusat kerajaan Singasari. Data demografi Malang pada awal abad 19 menunjuk pada angka sekitar 6.689 jiwa (Priambudi, 2018, p. 20). Pada tahun 1847, Malang telah menjadi kota kecil yang dihuni oleh beragam penduduk. Penduduk Malang terdiri dari orang-orang pribumi (Jawa dan Madura), Melayu, Arab, Cina, dan Eropa. Jumlah dan profil penduduk Malang tahun 1847 dapat digambarkan bahwa Kabupaten/*regentschap*

Malang berada pada satuan geografis Karesidenan Pasuruan yang terdiri dari 6 distrik. Distrik Karang Loh mempunyai 131 Desa dengan jumlah penduduk 16.532 jiwa. Distrik Gondang Legie memiliki 62 desa dengan penduduk 9.485 orang, Distrik Segoro mempunyai 71 Desa yang dihuni 9.734 jiwa, dan Kota Malang terdiri dari 24 Kampung yang dihuni 10.561 orang. Distrik Pakis memiliki 91 desa yang dihuni oleh 16.519 penduduk. Distrik Nganting mempunyai 54 desa dengan jumlah penduduk mencapai 7.627 orang (Bleeker, 1847, p. 175).

Dengan demikian jumlah penduduk Malang pada akhir tahun 1847 sebanyak 82.899 jiwa. Apabila penduduk Malang dirinci berdasarkan etnis, diperoleh data seperti tabel berikut ini.

**Tabel 1. Penduduk Malang Tahun 1847**

Etnik	Laki	Perempuan	Muda	Gadis	Total
Jawa	20.516	21.652	19.044	17.571	78.783
Madura	990	1.043	748	756	3.537
Arab	3	2	1	3	9
Melayu, Bugis, dll.	33	28	23	21	105
Eropa	29	20	18	19	86
China	136	63	96	84	379
<b>GRAND TOTAL</b>					<b>82.899</b>

Sumber: diolah dari (Bleeker, 1847, p. 75)

Data tabel di atas menunjukkan bahwa orang-orang Jawa dan Madura mendominasi penduduk Malang. Data itu menunjukkan dua hal, yakni tersedianya penduduk yang memadai sebagai pekerja perkebunan dan hal yang lain kepemilikan tanah penduduk yang 1/3 harus diserahkan untuk disewa tersedia bila merujuk pada beberapa isi pokok UU Agraria 1870 (Alkema, 1932). Tersedianya lahan perkebunan dan tenaga menjadi prasyarat bagi Malang menerima investasi dan perubahan ekonomi dari lokal ke global yang didominasi oleh sektor perkebunan dan industri.

### **Pabrik Gula Kebon Agung Sebelum dan pada Krisis Ekonomi**

Pabrik gula Kebon Agung berlokasi di Desa Kebon Agung, yakni Malang bagian Selatan. Pabrik Gula Kebon Agung menjadi salah satu pabrik gula besar yang berada di Malang. Pabrik ini didirikan oleh seorang pengusaha Tionghoa bernama Tan Tjwan Bie tahun 1905 dan pada saat itu masih dikelola secara perorangan. Pabrik Gula Kebon dalam produksi pertamanya tahun 1905 berkapasitas sebesar 500 TCD.<sup>1</sup> Tebu yang

<sup>1</sup> Satuan dalam sistem produksi gula pada masa kolonial

digunakan sebagai bahan baku produksi gula di pabrik adalah tebu pada masa-masa awal produksi berasal dari Tebu Rakyat. Hasil produksi awal mendapat respons baik sehingga perusahaan meningkatkan kualitas dan produksi gulanya serta melakukan inovasi. Inovasi perusahaan antara lain dalam bentuk produk baru pada tahun 1913 yakni *Hooft Suiker en Malasse* (gula utama tetes) untuk mengganti gula biasa sebelumnya. Perubahan kepemilikan perusahaan terjadi pada tahun 1917. Pabrik gula ini diserahkan kepada Biro Management NV. *Handel Landbouw Maatschappij Tiedeman dan Van Kerchem* sebagai pengelola baru (E. Megantara et al., 2015, p. 34).

Perubahan kepemilikan ikut memberi gairah pada kondisi perusahaan. Perusahaan berhasil meningkatkan produksinya melalui peningkatan kapasitas giling tebu untuk menjadi gula dari 1500 TCD menjadi 1800 TCD. Pada tahun berikutnya, status Pabrik Gula Kebon Agung berubah menjadi perusahaan bernama NV. *Suikerfabriek* Kebon Agoeng. Perubahan status perusahaan tersebut tercantum pada Akta Notaris Hendrik Willem Hazenberg No. 155 tanggal 20 Maret 1918 dan disahkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Gubernur Hindia Belanda tanggal 30 Mei 1918 No. 42. Bentuk usaha dari NV. *Suikerfabriek* Kebon Agoeng adalah *Naamloze Vennootschap*, yakni badan hukum yang difungsikan untuk menjalankan sebuah usaha dengan modal dan kepemilikannya dibagi berdasarkan berapa banyak saham yang dimiliki. Oleh karena itu perubahan kepemilikan dari perusahaan bisa dilakukan tanpa harus membubarkan perusahaan.

Pada tahun 1921, Pabrik Gula Kebon Agung mendapatkan suntikan modal dari *De Javasche Bank Agentschap* Malang. Saat itu *De Javasche Bank* Malang merupakan kontributor utama yang memberikan fasilitas seperti peminjaman kredit bagi pengusaha maupun pedagang besar. Bantuan tersebut digunakan oleh Pabrik Gula Kebon Agung untuk memperluas areal perkebunan tebunya dalam bentuk sewa tanah. Selain itu bantuan itu dimanfaatkan untuk pembangunan jalur angkut pengangkutan hasil perkebunan tebu. Rel kereta untuk pengangkutan tebu ini melintasi daerah Jalan Pos, kemudian Suku, Gading Wetan, Ketawanggede, Oro-oro Dowo, Sono Tengah hingga ke kawasan Pabrik Gula Kebon Agung. Dengan bantuan itu, maka pabrik mendapatkan keuntungan maksimal seperti yang tampak pada data tahun 1925 di mana hasil produksi gula mencapai 60.000 ton. Data itu menunjukkan 2 kali lipat lebih banyak jika dibandingkan dengan angka produksi 5 tahun sebelumnya (Emmen, 1930; Hazewinkel et al., 1909; Hudiyanto, 2015).

Kejayaan industri gula berangsur menurun di akhir tahun 1929 seiring dengan gejala krisis ekonomi yang melanda dunia yang mencapai puncaknya tahun 1930. Krisis tersebut berdampak pada bidang ekonomi seperti upah rendah karena beradaptasi dengan menurunnya keuntungan penjualan dan minimnya permintaan gula oleh

pasar dunia. Nilai jual berbagai komoditas juga ikut merosot, terutama komoditas yang masuk ke dalam perdagangan internasional seperti tembakau, kopi, dan kopra (Agustono & Junaidi, 2018; Booth, 2004). Krisis ekonomi 1930 membuat pemerintah Hindia Belanda harus melakukan perubahan dan adaptasi, salah satunya adalah diversifikasi lahan yang berdampak pada menurunnya luas lahan perkebunan tebu dan pada saat yang sama terjadi penanaman jenis komoditas ekonomi lain seperti buah-buahan, perluasan tanaman padi, dan jagung (Lekkerkerker, 1931).

Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi merosotnya harga gula di pasar dunia saat itu adalah diadakannya perjanjian antara negara-negara produsen gula. Mereka menyepakati *Chadbourne Agreement*, yang isinya antara lain mewajibkan negara anggota untuk menjaga keseimbangan harga gula dan melakukan mengurangi produksi. Keputusan itu mengikat dan juga dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda di sejumlah pabrik gula di Jawa (Galloway, 2005; Knight, 2013). Sebagian dari dampak *Chadbourne Agreement* adalah banyaknya pabrik gula di Hindia Belanda yang menderita kerugian karena pembatasan produksi dan minimnya penjualan gula. Pabrik gula yang ada di Jawa tidak bisa menghindari kebangkrutan karena krisis yang tidak segera pulih.

Salah satu pabrik gula yang bertahan dari situasi itu adalah Kebon Agung. Adaptasi yang dilakukan perusahaan adalah penyesuaian produksi sesuai permintaan dan dukungan memadai dari *De Javasche Bank*. *De Javasche Bank* memantau neraca keuangan hingga laporan keuangan dan keuntungan yang diperoleh secara ketat. Dukungan dan adaptasi yang dilakukan membuat perusahaan pada tahun 1930 masih mendapatkan keuntungan penjualan gula dari Bulan Desember hingga Juli tahun 1931 sebesar f 1,4 juta (gulden). Keuntungan diperoleh dari penjualan di pasar lokal (Hindia Belanda) dan ekspor ke pasar internasional (Ramadhani, 2022).

Upaya lanjutan Pabrik Gula Kebon Agung untuk terus bertahan dari krisis di antaranya adalah menjual 15% tanah yang ditanami tebu demi mengurangi beban pengeluaran perusahaan, membatasi penanaman tebu, membatalkan kontrak sewa tanah hingga menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Tetapi upaya tersebut belum menjadi solusi yang tepat bagi permasalahan ini. *De Javasche Bank* secara resmi memiliki hak penuh atas Pabrik Gula Kebon Agung setelah digadaikan pada tahun 1932, buntut panjang akibat kondisi perusahaan yang hampir gulung tikar. Pada tahun 1933, pemerintah menyiasati krisis yang terjadi dengan melakukan pembatasan tanam untuk seluruh lahan perkebunan yang dimiliki pabrik gula yang masih beroperasi. Pabrik Gula Kebon Agung mendapatkan jatah produksi sebesar 30% dari total produksi sebelum krisis.

Kesulitan lain yang menyertai dinamika pabrik gula Kebon Agung adalah manajemen pekerja di mana sebagian besar dari pekerja pabrik harus dirumahkan paksa. Di tahun yang sama, Dewan Utama Asosiasi Gula Malang mengadakan pengisian kotak pendapat bagi para pekerja yang diberhentikan akibat krisis. Langkah ini diambil untuk menyalurkan suara-suara para pekerja, dan memberikan mereka kesempatan direkrut kembali nanti saat kondisi perekonomian sudah membaik dan stabil. Kotak pendapat tersebut merupakan bukti bahwa krisis tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga segala aspek di dalamnya termasuk para pekerja. Krisis tersebut membuat beberapa pabrik gula lain di Malang harus dibubarkan/pailit, seperti Pabrik Sempalwadak, Panggungrejo dan Pabrik Gua Kreet. Keadaan yang semakin sulit itu tidak membuat Pabrik Gula Kebon Agung ikut berhenti melakukan produksi. Meskipun sempat terhenti, namun penanaman tebu dari Pabrik Gula Kebon Agung dilanjutkan kembali pada tahun yang sama dengan biaya yang diperoleh dari pinjaman *De Javasche Bank (Departement van Landbouw, 1933; Knight, 2014)*.

Pada tahun 1935 Pabrik Kebon Agung melakukan ekspansi usaha dengan mengakuisisi Pabrik Gula Sempalwadak yang telah bangkrut sebagai upaya yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan eksistensi Pabrik Gula Kebon Agung di tengah krisis yang melanda. Usaha tersebut kemudian membuahkan hasilnya di tahun 1937, di mana pada tahun tersebut pabrik melakukan panen tebu di lahan perkebunan sendiri seluas kurang lebih 1000 ha dan menghasilkan kurang lebih 186.000 kuintal gula. Pada tahun 1938, pabrik gula Kebon Agung mengalami penurunan jumlah produksi meskipun jumlah penurunan tidak terlalu signifikan ke posisi 165.000 kuintal gula. Pada 2 tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1940. Pabrik Gula Kebon Agung mampu memproduksi gula di angka 177.590 kuintal. Jumlah ini tidak sebanyak jumlah produksi gula di tahun 1937 yaitu 186.000 kuintal. Meskipun demikian kenaikan itu dapat dimaknai bahwa pabrik gula Kebon Agung masih bisa beradaptasi dengan berbagai situasi dan perubahan ekonomi global, termasuk pada masa krisis.

### **Bertahan di Tengah Krisis: Kestinambungan Pabrik Gula Kebon Agung hingga Dinasionalisasi**

Perpindahan kekuasaan dari kolonial Belanda ke tangan kolonial Jepang tidak semudah membalikkan telapak tangan bagi kelangsungan Pabrik Gula Kebon Agung. Banyak hal yang harus diadaptasi terutama penyelesaian terkait aset-aset yang dimiliki oleh pemilik sebelumnya. Fokus Jepang adalah melakukan rehabilitasi ekonomi, salah satu cara dilakukan adalah perbaikan prasarana ekonomi, mulai dari jembatan, alat transportasi, dan komunikasi. Mereka melakukan perubahan kebijakan



ekonomi pada berbagai sektor, salah satunya adalah sektor perkebunan. Pada sektor perkebunan muncul Undang-Undang No. 332/1942 yang mengatur tentang kebijakan untuk mempertahankan perkebunan-perkebunan strategis. Perkebunan strategis tersebut diharapkan dapat membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Selain perkebunan strategis, industri strategis juga menjadi prioritas bagi pemerintah Jepang mengingat industri menghasilkan banyak keuntungan.

Industri gula pada masa pendudukan Jepang dikelompokkan sebagai salah satu industri strategis. Pemerintah Jepang melakukan pengawasan terhadap 549 industri strategis yang mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh Jepang untuk perang. Industri strategis yang dimaksud adalah 12 cabang industri dan 1 lapangan usaha yaitu industri kimia, industri mesin dan perbengkelan, industri semen dan keramik, industri kertas dan percetakan, industri gula, industri makanan, industri tekstil, galangan kapal, industri penghasil kebutuhan rumah tangga, industri obat-obatan, industri konstruksi, dan industri pembuatan garam. Pada masa pendudukan Jepang, *Algemeen Syndicate van Suiker Industrie* sebagai departemen yang memegang kendali pada industri gula di Jawa digantikan dengan *Java Tokyo Rengokai* pada 1 Juni 1942. *Java Togyo Rengo Kai* dibentuk sebagai badan yang mengawasi pabrik dan buruh pabrik gula (Wijarnako, 2013, pp. 49–50). Selain itu, organisasi yang menangani tentang penjualan gula masa Hindia Belanda yaitu NIVAS (*Nederlandsch-Indische Vereeniging voor het Opzet van Suiker*) digantikan oleh *Java Sato Kanbai Rengo Kumiai* milik Jepang.

Setelah membentuk badan-badan baru untuk mengurus industri gula, Jepang kemudian mengambil alih perkebunan dan pabrik-pabrik gula di Jawa. Perintah untuk mengambil alih tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan dari pemerintah Jepang. Selanjutnya perkebunan dan industri gula itu akan diserahkan kepada 6 perusahaan Jepang yaitu *Dai Nippon Saito*, *Seito Taiwan*, *Seiji Meiji*, *Ensuiko Seito*, *Okinawa Seito* dan *Nanyo Kohatsu*. Pabrik Gula Kebon Agung menjadi salah satu pabrik yang diambil alih oleh Jepang. Kepemilikan Pabrik Gula Kebon Agung yang sebelumnya dipegang oleh Tiedeman & van Kerchem, dialihkan kepada *Ensuiko Seiko Kabushiki Kaisha*.

Jepang masuk secara total ke Karesidenan Malang pada 8 Maret tahun 1942. Karesidenan Malang adalah wilayah administratif pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang meliputi wilayah Malang Raya dengan 8 pembagian wilayah yaitu Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang. Sebelumnya Malang merupakan wilayah di bawah Karesidenan Pasuruan, namun ditahun 1928 terjadi reorganisasi wilayah yakni Karesidenan Pasuruan dengan Probolinggo dan

Lumajang. Di tahun 1930 pusat Karesidenan pindah ke Malang sehingga Malang disebut sebagai Karesidenan Malang. Pemandahan pusat Karesidenan didasari oleh faktor ekonomi dan sosial, saat itu perkembangan Malang di bidang perkebunan membuatnya menjadi kota besar.

Pendudukan Jepang di Malang ditandai dengan tentara Jepang yang berada di Boulevard Ijen di bawah pimpinan Kolonel Kato. Pada masa penjajahan Jepang terdapat 8 pabrik gula yang masih beroperasi di Karesidenan Malang. Kebijakan Jepang untuk mengurangi aktivitas produksi dari industri gula menyebabkan pabrik-pabrik gula di Karesidenan Malang ikut mengalami penurunan. Namun Pabrik Gula Kebon Agung masih mempertahankan diri dari krisis politik dan perubahan kebijakan Jepang. Pabrik Gula Kebon Agung masih melakukan produksi pada masa penjajahan Jepang. Hal itu berbanding terbalik dengan pabrik-pabrik gula yang lain di Jawa. Pada tahun 1942 angka produksi Pabrik Gula Kebon Agung berada di 16.869 ton, kemudian di tahun 1943 adalah 8.873 ton, tahun berikutnya mencapai 11.803 ton dan terakhir di tahun 1945 produksi gula yang dihasilkan adalah 3.758 ton. Fluktuasi produksi gula yang terjadi pada masa kolonial Jepang tidak lepas dari situasi politik dan kebijakan Jepang yang fokus pada perang dan bukan pada ekonomi. Meskipun demikian PG Kebon Agung tetap menjalankan produksi hingga masa-masa awal Indonesia merdeka (Ramadhani, 2022).

Proklamasi merupakan tanda bahwa Indonesia telah mencapai kemerdekaan, namun kemerdekaan yang utuh pada dasarnya harus dibarengi dengan pengakuan yang tidak hanya secara *de facto* tetapi juga pengakuan secara *de jure*. Konsekuensi lain dari kemerdekaan adalah kebebasan mengatur negara sendiri dan mengatur ekonomi dalam negeri. Pada masa-masa awal kemerdekaan harapan itu masih jauh dari sempurna. Perusahaan-perusahaan Belanda masih dimiliki oleh orang Belanda dan juga Jepang, tidak terkecuali PG Kebon Agung. Sejumlah krisis sebagai tantangan negara yang baru saja merdeka, Indonesia dihadapkan pada persoalan politik yang serius. Revolusi kemerdekaan 1945-1949 dan upaya mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan (Kahin, 1995; Ricklefs, 2001). Indonesia juga harus menghadapi upaya Belanda kembali menjajah Indonesia dan Agresi Militer 1 dan 2. Selain itu, Indonesia juga harus menghadapi pemberontakan di tingkat lokal seperti PRRI/Permesta, DI/TII, dan gejolak lainnya di berbagai daerah (Harvey, 1987; Lucas, 1989; McGregor, 2008; Zed, 1997).

Upaya mempertahankan diri sebagai negara merdeka, Indonesia harus juga mengalami perundingan dan membahas sejumlah perjanjian khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan dan posisi perusahaan asing (Wijarnako, 2013). Hal itu terjadi karena dominasi perusahaan asing di Indonesia setelah kemerdekaan masih

menjadi momok mengingat sebagian besar perusahaan yang ada adalah milik asing. Pascakemerdekaan, Indonesia masih mewarisi kebijakan-kebijakan kolonial, termasuk kebijakan ekonomi, yang di dalamnya mengatur industri gula nasional yang sebagian besar kebijakannya tidak menguntungkan rakyat. Oleh karena itu pemerintah memiliki keinginan untuk membuat kebijakan baru yang lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat. Usaha untuk memperbaiki stabilitas ekonomi di Indonesia dimulai dari sektor perkebunan dan industrialisasi. Karena kedua sektor tersebut merupakan aset penting negara dengan jumlah yang sangat besar, bahkan sejak Indonesia masih dijajah. Upaya pemerintah untuk mewujudkan stabilitas ekonomi bukanlah hal yang mudah, meskipun harus mengalihkan kebijakan ekonomi Indonesia dari kepentingan Belanda menuju kepentingan bangsa (Kanumoyoso, 2001).

Upaya yang tidak kenal kata menyerah dari pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, khususnya perkebunan telah menuai hasil. Salah satunya terwujud dengan keluarnya Pengumuman No. 2 tahun 1950 yang melibatkan tiga menteri yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Perkebunan, dan Menteri Pertanian, dilakukan pembentukan panitia pengembalian perkebunan kepada panitia yang dibentuk. Pabrik Gula Kebon Agung termasuk ke dalam daftar pabrik gula yang dikelola oleh panitia bentukan pemerintah tersebut. Tetapi Pabrik Gula Kebon Agung tidak mendapatkan rehabilitasi karena kondisi pabrik saat itu dalam kondisi relatif masih sehat. Pabrik lain yang berada di wilayah Malang yaitu Pabrik Gula Krebet mendapatkan rehabilitasi dengan bantuan Menteri Keuangan lewat Bank Nasional Indonesia. Bantuan tersebut berupa dana atau modal pembangunan pabrik. Di tahun 1951, Pabrik Gula Kebon Agung melakukan masa produksi selama hampir lima bulan dan telah mengakhiri masa promosi produksi dengan melakukan panen tebu seluas 2.500 ha (hektar). Dari jumlah panen itu, Pabrik Gula Kebon Agung dapat memproduksi gula lebih dari 22.000 ton. Pada tahun 1952 Pabrik Gula Kebon Agung merupakan satu-satunya pabrik gula di Malang yang masih terus menjalankan proses produksi gula hingga dinasionalisasi tahun 1958 (Ramadhani, 2022).

### **Nasionalisasi Pabrik Gula Kebon Agung**

Usaha untuk menasionalisasikan Perusahaan Asing di Indonesia tidak semudah yang dibayangkan, namun harus melalui proses yang berliku. Meskipun demikian, upaya itu terus dilakukan untuk mencapai cita-cita sebagai negara merdeka, yakni memiliki sistem ekonomi nasional sendiri. Nasionalisasi yang dianggap sebagai langkah awal untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat mendapat tantangan berarti karena

kurangnya tenaga ahli yang membantu dalam hal mengurus perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi. Selain itu, kendala dan tekanan dari berbagai arah itu menyebabkan perekonomian di Indonesia semakin melemah. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah melakukan koordinasi khusus untuk membentuk badan yang membantu dalam mengorganisir perusahaan atau pabrik gula di Indonesia. Badan tersebut adalah BPPGN (Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara) dan PPN (Pusat Perkebunan Negara).

Berdirinya BPPGN dan PPN membuat kondisi perkebunan dan pabrik gula lebih teratur dibanding sebelumnya. Setelah pembentukan kedua badan tersebut dirasa berhasil, pemerintah membuat badan baru untuk membantu tugas dari BPPGN yaitu PPRI (Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia). PPRI ditugaskan sebagai pengelola perusahaan gula bekas milik Mangkunegara dan Kasunanan. Diharapkan PPRI dapat mengelola dengan baik perusahaan gula dan dapat meringankan beban para petani tebu dan buruh pabrik yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Pembentukan badan-badan tersebut juga merupakan langkah awal untuk menghapus peraturan-peraturan yang bersifat memberatkan. Rakyat tidak lagi harus bekerja melayani pejabat pemerintah dan pabrik gula, aturan ini sebelumnya menjadi aturan kerja wajib yang berlaku pada masa Kolonial.

Bentuk keseriusan pemerintah selanjutnya untuk melakukan nasionalisasi perusahaan lainnya adalah mendirikan Pusat Penjualan Gula Indonesia (PPGI). PPGI dibentuk untuk menyaingi NIVAS sebagai pusat penjualan dan penyaluran gula. Tidak jauh berbeda, PPGI mendapatkan 10% penyaluran dari total produksi nasional. PPGI juga memperoleh jaminan keuntungan, dengan begitu tujuan untuk menandingi NIVAS dapat terlaksana. Pada tahun 1952 pembelian gula pada NIVAS masih dilakukan dengan penetapan yang telah ditentukan oleh NIVAS sendiri. Ketentuan yang dimaksud adalah mengenai pembelian gula paling sedikit 45 ton untuk perusahaan swasta dan memberi sedikit kelonggaran untuk mereka yang sudah menjadi anggota PPGI. Paling sedikit pembelian gula untuk anggota PPGI adalah 5 ton gula dan mereka wajib mencatat pembelian tersebut di hari sabtu. Di Jawa Timur, pembelian gula dan laporan pembelian gula diserahkan kepada PPGI Jawa Timur. Pembayaran nantinya dilakukan di Bank Perdagangan Indonesia Radjawali 12 atau di Bank Negara Indonesia Surabaya.

Langkah untuk melakukan nasionalisasi industri gula tanah air kembali dilanjutkan pada tahun 1957 dengan mengambil alih seluruh pabrik gula milik asing secara bersamaan (Kanumoyoso, 2001; Mubyarto, 1991). Langkah tersebut diharapkan dapat membuat pemerintah Indonesia mengendalikan tata niaga gula secara utuh. Industri gula nasional bisa melepaskan diri dari genggamannya NIVAS. Kemudian NIVAS

diserahkan kepada PPGI sebagai satu-satunya badan yang mengurus tentang perdagangan gula di Indonesia. Nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia dilakukan tepat setelah perundingan dengan majelis umum PBB mengenai status Irian Barat gagal. Melalui kementerian perindustrian, pemerintah melakukan nasionalisasi dengan mengambil aset milik perusahaan-perusahaan asing. Untuk membantu pemerintah melakukan akomodasi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, maka dibentuk Pusat Perkebunan Negara Baru (PPN-Baru) lewat SK Menteri Pertanian Nomor 229/U Tahun 1957. Undang-Undang yang mengatur tentang nasionalisasi perusahaan baru diatur di tahun 1958 sebagai bentuk jaminan hukum.

## KESIMPULAN

Sejak didirikan Pabrik Gula Kebon Agung telah melewati naik turunnya perkembangan industri gula dari masa kejayaan, masa kritis hingga dinasionalisasikan. Selain itu manajemen yang mengelola Pabrik Gula Kebon Agung juga silih berganti. Begitu pula orang-orang yang ada di dalamnya, salah satunya adalah pemimpin Pabrik Gula Kebon Agung. Sejak masa penjajahan Jepang, tepatnya pada tahun 1942 Pabrik Gula Kebon Agung dipimpin oleh *Van Spanye* yang merupakan orang berkebangsaan Belanda. Setelah dinasionalisasikan, tahun 1958 *Van Spanye* digantikan oleh Imam Moedjono Tirtohadiwidjodjo sebagai pemimpin baru Pabrik Gula Kebon Agung. Beberapa aspek penting dalam industri gula adalah tebu, lahan, pabrik, dan tenaga kerja. Sama halnya seperti tebu, tenaga kerja merupakan bagian penting pada proses pembuatan gula. Industri gula menyerap banyak sekali tenaga kerja terutama dari penduduk di sekitar pabrik. Oleh karena itu wilayah penghasil gula cenderung dikelilingi pemukiman padat penduduk. Termasuk para pekerja dari Pabrik Gula Kebon Agung yang kebanyakan tinggal di sekitar wilayah pabrik.

Pabrik Gula Kebon Agung merupakan salah satu pabrik gula yang bertahan melewati beberapa masa. Tidak hanya masa kejayaannya, industri gula pada masa Hindia Belanda juga melewati masa-masa krisis. Krisis tersebut mengakibatkan menurunnya perekonomian dunia termasuk di Hindia Belanda. Dampak lainnya adalah nilai ekspor industri gula mengalami kemerosotan. Untuk menjaga harga gula dunia, pemerintah Hindia Belanda menyetujui perjanjian *Chadbourne Agreement* yang isinya mengharuskan pemerintah menurunkan jumlah produksi gula untuk seluruh pabrik di Jawa. Akibat krisis yang terus berlanjut, stabilitas ekonomi sulit dicapai. Beragam perjanjian terus diupayakan untuk pemulihan ekonomi, namun selalu gagal.

Salah satu upaya konstruktif yang dilakukan pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan adalah menasionalisasikan perusahaan-perusahaan milik asing yang

ada di Indonesia, termasuk Pabrik Gula Kebon Agung. Setelah dinasionalisasi, Pabrik Gula Kebon Agung menjadi milik negara dan pengelolaannya diserahkan kepada BPU-PPN (Badan Pimpinan Umum- Perkebunan Gula Negara ). Pabrik Gula Kebon Agung tetap melakukan produksi seperti biasanya. Beberapa aspek penting yang terjadi di dalam Pabrik Gula Kebon Agung adalah perubahan di dalam manajemen Pabrik Gula Kebon Agung. Pemimpin Pabrik Gula Kebon Agung yang pada awalnya merupakan orang berkebangsaan Belanda diganti orang Indonesia, yaitu Van Spanye (1942-1958) yang digantikan oleh Imam Moedjono Tirtohadiwidjodjo (1958-1965). Pergantian ini menandai peralihan kepemimpinan perusahaan Pabrik Gula Kebon Agung menjadi perusahaan milik negara Indonesia. Dengan demikian, perusahaan Pabrik Gula Kebon Agung juga telah menjadi satu-kesatuan atau terintegrasi dengan perusahaan-perusahaan lain yang termasuk dalam daftar perusahaan yang dinasionalisasi untuk tujuan yang sama, yaitu untuk stabilitasi ekonomi dan memberi kontribusi ekonomi pada bangsa dan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustono, B., & Junaidi, J. (2018). "The Dutch Colonial Economic Policy: Coffee Exploitation in Tapanuli Residency, 1849-1928." 25, no. 2 (2018). *KEMANUSIAAN: The Asian Journal of Humanities*, 25(2), 49–71.
- Alkema, B. (1932). *Agrarische regelingen in Nederlandsch-Indië*. Tjeenk Willink & Zoon N.V.
- Basundoro, P. (2009). *Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang Sejak Kolonial sampai Kemerdekaan*. Ombak.
- Basundoro, P. (2011). *Rakyat Miskin dan Perebutan Ruang di Kota Surabaya 1900-1960an*. Universitas Gadjah Mada.
- Bleeker, P. (1847). Bevolking der residentie Passaroen op het einde van 1847. *Tijdschrift Voor Nederlandsch-Indië, Negende Jaargang (Eerste Deel)*, 158–165.
- Booth, A. (2004). Linking, de-linking and re-linking: Southeast Asia in the global economy in the twentieth century. *Australian Economic History Review*, Vol. 44,(No. 1), 35–51.
- BPS Malang. (2020). *BPS Malang: Pengamatan Suhu di Kota Malang (°C)*. BPS Malang.
- Departement van Landbouw, N. en H. (Batavia). (1933). *Regeeringsbemoeiens met het suikervraagstuk op Java*. Landsdrukkerij.
- E. Megantara, Antariksa, & Sari, K. E. (2015). Model Struktural Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsep Pelestarian Kawasan Pabrik Gula Kebon Agung Dan Krebet Malang. *Jurnal Tata Kota Dan Daerah*, 7(1), 33–42.
- Emmen, Q. A. D. (1930). *Rietsuikerfabrieken op Java en hare machinerieën*. [[uitgever niet vastgesteld].
- Galloway, J. H. (2005). The Modernization of Sugar Production in Southeast Asia, 1880-1940. *Geographical Review*, 95(1), 1–23.
- Gemeenteraad van Malang. (1927). *Malang, de bergstad van Oost-Java*. De Gemeenteraad.

- Handinoto, H. (1996). Perkembangan Kota Malang Pada Jaman Kolonial (1914-1940). *DIMENSI*, 22((September-Desember)).
- Harvey, B. S. (1987). *Kahar Muzakar, dari Tradisi ke DI/TII*. Grafiti Press.
- Hazewinkel, J. J., Kolk, F. J. J., & van der Marx, F. T. N. (1909). *Nieuwere methoden tot verwerking van rietsuikermelasse en andere afoalproducten van de rietsuikerfabrieken op Java*. G.C.T. van Dorp & Co.
- Hudiyanto, R. (2015). 2015. Kopi dan Gula: Perkebunan Di Kawasan Regentschap Malang, 1832-1942. *Urnal Sejarah Dan Budaya*, IX(1), 96–115.
- Kahin, G. Mc. T. (1995). *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia* (N. B. Soemanto, Trans.). UNS Press dan Sinar Harapan.
- Kanumoyoso, B. (2001). *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia: Menguatnya Peran Ekonomi Negara*. Pustaka Sinar Harapan.
- Kemmerling, G. L. L., & Dienst van het mijnwezen in Nederlandsch Oost-Indië. (1921). *De uitbarsting van den G. Keloet in den nacht van den 19den op den 20sten Mei 1919*. Landsdrukkerij.
- Knight, G. R. (2013). *Commodities and Colonialism: The Story of Big Sugar in Indonesia, 1880-1942*. Brill.
- Knight, G. R. (2014). Sugar without Slaves: The Agrarian Basis for the Industrial Project. In *Sugar, Steam and Steel* (pp. 95–132). University of Adelaide Press.
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah* (I). Bentang.
- Lekkerkerker, J. G. W. (1931). *Probolinggo, geschiedenis en overlevering*. J.H. de Bussy.
- Lucas, A. E. (1989). *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi*. Pustaka Utama Grafiti.
- McGregor, K. E. (2008). *Ketika Sejarah berseragam, Membokar Ideologi Militer dalam menyusun Sejarah Indonesia*. Syarikat.
- Mubyarto. (1991). *Gula; Kajian Sosial Ekonomi*. Aditya Media.
- Priambudi, T. (2018). *Perubahan Ekologi Pemukiman Eropa di Gementee Malang 1917-1942* [Thesis]. Universitas Airlangga.
- Ramadhani, D. M. (2022). *Pabrik Gula Kebon Agung di Malang: Dari Krisis ke Nasionalisasi 1930-1958* [Thesis]. Airlangga.
- Ricklefs, M. C. (2001). *A History of Modern Indonesia since c.1200* (Third Edition). PALGRAVE McMilan.
- Suwardono, S. (1996). *Monografi Sejarah Kota Malang*. Sigma Media.
- Veth, P. J. (1882). *Java, geographisch, ethnologisch, historisch*. Erven F. Bohn.
- Wijarnako, N. B. (2013). *Industri Pabrik Gula Padjarakan di Probolinggo dari Swastanisasi hingga Nasionalisasi 1885-1960* [Thesis]. Airlangga.
- Zed, M. (1997). *Pemerintah Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*. Pustaka Utama Grafiti.